



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Juni 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DJAYANTI SARI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SPESIALIS PROGRAM STUDI ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
3. NHK : 1014751

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m²/173 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m²/92 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 703 m²/703 m² di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 859.000.000

1. MOBIL, HONDA JEEP/CRV 1.5 TC PRESTIGE CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS/AKN4156 (4X2) A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO/D1A02N 18M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, HONDA MINIBUS/DG48 1.5 RS CVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. 500.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 324.767.109

F. HARTA LAINNYA Rp. ---



Sub Total	Rp.	3.783.767.109
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.783.767.109

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.